

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LPPD
(LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH)**

TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 600 / 31.1 /Perkimtan-PS/I/2020
Lampiran :
Perihal : *LPPD Tahun 2019*

Painan, 28 Januari 2020

Kepada.
Yth. Bupati Pesisir Selatan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesisir Selatan No: 100/24/Pem-Otda/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak LPPD Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan

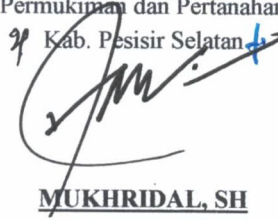
MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH IJIN LOKASI
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	PERMOHONAN IJIN LOKASI	JUMLAH IJIN LOKASI	KET.
	NIHIL		

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR TANAH YANG DIMANFAATKAN BERDASARKAN IZIN MEMBUKA
TANAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	TANAH YANG TELAH DIMANFAATKAN BERDASARKAN IZIN MEMBUKA TANAH	LUAS IZIN MEMBUKA TANAH YANG DITERBITKAN	KET.
	NIHIL		

Painan, Januari 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan


MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH RUMAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

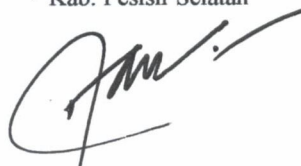
NO	LOKASI	JUMLAH NAGARI	JUMLAH RUMAH	KET.
1	2	3	4	5
1	KOTO XI TARUSAN	23	14,638	
2	BAYANG	17	1,447	
3	BAYANG UTARA	6	9,632	
4	IV JURAI	20	6,787	
5	BATANG KAPAS	9	11,692	
6	SUTERA	12	13,351	
7	LENGAYANG	9	16,166	
8	RANAH PESISIR	10	10,297	
9	LINGGO SARI BAGANTI	16	7,801	
10	AIR PURA	10	3,221	
11	PANCUNG SOAL	10	5,200	
12	BASA IV BALAI TAPAN	10	2,455	
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	3,147	
14	LUNANG	10	5,038	
15	SILAUT	10	3,366	
	JUMLAH	182	114,238	

Painan, Januari 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

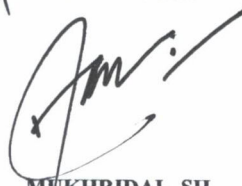
**DAFTAR JUMLAH KASUS KONFLIK PERTANAHAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	KASUS	LOKASI	SELESATIDAK SELESAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Tanah Nurbaiti	Koto XI Tarusan	Selesai	
2	Tanah Aprizal	Koto XI Tarusan	Selesai	
3	Tanah Zainal.B	Koto XI Tarusan	Selesai	
4	Tanah Agropolitan	Lengayang	Selesai	
5	Tanah Patok batas Panasahan	IV Jurai	Selesai	
6	Tanah sunir Malinkayo	Koto XI Tarusan	Selesai	
7	Tanah Yulisman	Koto XI Tarusan	Selesai	
8	Tanah Yulisman	Koto XI Tarusan	Selesai	

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

SDM Pendukung Program dan Kegiatan:

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2019

No	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN															
	Struktural															
1	MUKHRIDAL, SH/ 19640128 199309 1 001				V		V					V		V		
2	Ir. FEBRIANES, MT/19640202 199303 1 009					V	V					V			V	
3	FIONNA MIRZAL, ST, M.Si/ 19780515 200604 2 021					V		V			V					V
4	BERISKHAN, S.Sos, MSi/ 19720302 199302 1 001					V	V					V				V
5	RUDI ANWAR, ST/ 19740129 200804 1 001				V		V				V					
6	YENEDI, S.Sos/ 19700131 198903 1 001				V		V				V					V
7	AFRIANTO, SE/ 19780205 200604 1 016				V		V				V					V
8	POPPY MAYASARI, ST/ 19821221 200902 2 008				V			V			V					V
9	Drs. IRWANSYAH/ 19670630 200801 1 006				V		V				V					V
10	IKHWAN WILDANI, ST/ 19760827 200801 1 015				V		V				V					
11	PITPUSPITA, ST/ 19771122 200902 2 002					V		V			V					
12	EDRUSPARDI, ST/19830412 201001 1 039				V		V				V					
13	YOGI QADARMINTO, ST/ 19880510 201001 1 006				V		V				V					
14	EKA HASMATATI PUTRI, ST/ 19820323 200501 2 008				V			V			V					
15	HENDRA ARMAN, ST/ 19801125 201101 1 007				V		V				V					
16	ANDI YUSRAPEL SABIR, SIP, MM/ 19740410 200604 1 002					V		V			V					V

No	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
17	MARNI, SH/ 19621009 198503 2 003				V			V			V					
18	ZULMIRA, SH/ 19790808 101407 2 005				V			V			V					
19	DEVI MELVIRA/ 19820810 201001 2 012		V					V		V						
20	YUSMADI MARTIAS, ST/ 19690617 201407 1 001				V		V				V					
21	JUFRI/ 19651231 200312 1 026		V				V			V						
22	RONI PASLAH/ 19781020 200701 1 009		V				V			V						
23	INDRA GUSMADI, ST/ 19760810 200604 1 004				V		V				V					
24	PRIMA JIYESTHA AKSA PUTRI, ST/19870507 201903 2 001				V			V			V					
25	ROUDOLF HERLADIOANO, ST/19910126 201903 1 001				V		V				V					
26	FARADILLA, ST/19950427 201903 2 001				V			V			V					
27	DESNAWATI/ 19641230 200312 2 002		V					V		V						
28	YOHANDRA/ 19801119 201407 1 002		V				V			V						
29	TRIO DIRGA UTAMA/ 19871127 201001 1 010		V				V			V						
30	IRDANENGSIH/ 19840108 201001 2 029		V					V		V						
	Total		7		18	5	18	12		7	20	3		1		7

Painan, Januari 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

Lampiran III.2
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : PESIR SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : WAJIB

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
						URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERTANAHAN	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERTANAHAN	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD}}{\text{Jumlah Program Nasional}} \times 100\%$	- jml program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - jml program Nasional yg dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- jml program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - jml program Nasional yg dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	- jml program Nasional (RKP), sebanyak 1 program - jml program Nasional yg dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	100.00%	100.00%	100.00%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA Pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	$\frac{\text{Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada}}{\text{Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN}} \times 100\%$	- Perda Pelaksanaan sebanyak 1 - Perda yang seharusnya dilaksanakan sebanyak.....	- Perda Pelaksanaan sebanyak 1 - Perda yang seharusnya dilaksanakan sebanyak.....	- Perda Pelaksanaan sebanyak 1 - Perda yang seharusnya dilaksanakan sebanyak.....				
3	PENATAAN KELAMBAGAAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan yang ada (yang diisi)}}{\text{Jumlah jabatan yang ada}} \times 100\%$	Jabatan yg ada Sebanyak 8 Jabatan yg harus ada sebanyak 8	Jabatan yg ada Sebanyak 4 Jabatan yg harus ada sebanyak 4	Jabatan yg ada Sebanyak 4 Jabatan yg harus ada sebanyak 4	100%	100%	100%	
		Keberadaan Jabatan fungsional dalam stuktur organisasi SKPD	5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
			6	Rasio PNS Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah PNS SKPD}}{\text{Total PNS Kabupaten}} \times 100\%$	- PNS SKPD sebanyak personil 18 - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6801	- PNS SKPD sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6801	- PNS SKPD sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6801	0.26%	0.07%	0.10%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
						URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERTANAHAN	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERTANAHAN	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kopenensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\text{Total pejabat SKPD yang ada}} \times 100\%$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpin, sebanyak 5 orang Pejabat yg ada sebanyak 8 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpin, sebanyak 2 orang Pejabat yg ada sebanyak 4 orang	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpin, sebanyak 4 orang Pejabat yg ada sebanyak 4 orang	62.50%	50.00%	100.00%	
				Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan}}{\text{Jumlah total pejabat SKPD yang ada}} \times 100\%$	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 8 Org - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jabatan	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 4 Org - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jabatan	- Pejabat yang memenuhi persyaratan, sebanyak 4 Org - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jabatan	100%	100%	100%	
			9	Keberadaan Dokumen Perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada, sebanyak 3 jenis - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA	Ada, sebanyak 3 jenis - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA	Ada, sebanyak 3 jenis - RENSTRA - RENJA - RKA - DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	
				Jumlah Program RPKD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	$\frac{\text{Jumlah program RPKD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD}}{\text{Jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD}} \times 100\%$	- Program RPKD yang diakomodir dlm RENJA SKPD, sebanyak 6 program Program Renja SKPD yang ditetapkan dlm RPJMD, sebanyak 6	- Program RPKD yang diakomodir dlm RENJA SKPD, sebanyak 2 program Program Renja SKPD yang ditetapkan dlm RPJMD, sebanyak 2	- Program RPKD yang TIDAK diakomodir dlm RENJA SKPD, sebanyak 3 program Program Renja SKPD yang ditetapkan dlm RPJMD, sebanyak 3	100%	100%	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	$\frac{\text{Jumlah program RPKD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD}}{\text{Jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD}} \times 100\%$	- Program RPKD yang diakomodir dlm RENJA SKPD, sebanyak 6 program Program Renja SKPD yang ditetapkan dlm RPJMD, sebanyak 6	- Program RPKD yang diakomodir dlm RENJA SKPD, sebanyak 2 program Program Renja SKPD yang ditetapkan dlm RPJMD, sebanyak 2	- Program RPKD yang TIDAK diakomodir dlm RENJA SKPD, sebanyak 3 program Program Renja SKPD yang ditetapkan dlm RPJMD, sebanyak 3	100%	100%	100%	
				Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD	$\frac{\text{Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD}}{\text{Jumlah program dalam RKA SKPD}} \times 100\%$	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm RKA SKPD, sebanyak 6 program Program dlm RKA SKPD, sebanyak 6 program	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm RKA SKPD, sebanyak 2 program Program dlm RKA SKPD, sebanyak 2 program	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm RKA SKPD, sebanyak 3 program Program dlm RKA SKPD, sebanyak 3 program	100%	100%	100%	
			11	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD	$\frac{\text{Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD}}{\text{Jumlah program dalam RKA SKPD}} \times 100\%$	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm RKA SKPD, sebanyak 6 program Program dlm RKA SKPD, sebanyak 6 program	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm RKA SKPD, sebanyak 2 program Program dlm RKA SKPD, sebanyak 2 program	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm RKA SKPD, sebanyak 3 program Program dlm RKA SKPD, sebanyak 3 program	100%	100%	100%	
				Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam DPA SKPD	$\frac{\text{Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam DPA SKPD}}{\text{Jumlah program dalam DPA SKPD}} \times 100\%$	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm DPA SKPD, sebanyak 6 program Program dalam DPA SKPD sebanyak 6 program	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm DPA SKPD, sebanyak 2 program Program dalam DPA SKPD sebanyak 2 program	- Program RENJA RPKD yang diakomodir dlm DPA SKPD, sebanyak 3 program Program dalam DPA SKPD sebanyak 3 program	100%	100%	100%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
						URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERTANAHAN	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERTANAHAN	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran SKPD _____ x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 23.010.980.764,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 18.954.722.916,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 10.184.523.105,-	1.25%	1.03%	0.55%	
					Total APBD	- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.923.981.831.39,-	- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.923.981.831.39,-	- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.846.923.981.831.39,-				
		Besaran Belanja Modal	14	Belanja Modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal _____ x 100%	Belanja Modal skpd sebesar Rp. 4.294.847.117,-	Belanja Modal skpd sebesar Rp. 7.519.695.189,-	Belanja Modal skpd sebesar Rp. 10.184.523.105,-	19.37%	237.30%	101.35%	
					Total Belanja SKPD	Total Belanja SKPD sebesar Rp. 22.168.682.228,-	Total Belanja SKPD sebesar Rp. 3.168.893.285,-	Total Belanja SKPD sebesar Rp. 10.049.149.700,-				
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan _____ x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 9.500.000,-	Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar 0	Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar 0	0.05%	0.00%	0.00%	
					Total belanja barang dan jasa SKPD	Total Belanja Barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 17.280.783.647,-	Total Belanja Barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 11.390.027.727,-	Total Belanja Barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 0,-				
		Laporan Keuangan SKPD	16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan _____ x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 9.500.000,-	Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar 0	Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar 0	0.04%	0.00%	0.00%	
					Total Belanja SKPD	Total Belanja SKPD sebesar Rp. 22.168.682.228,-	Total Belanja SKPD sebesar Rp. 3.168.893.285,-	Total Belanja SKPD sebesar Rp. 10.049.149.700,-				
		Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada, sebanyak 3 jenis: 1. Laporan Keuangan LRA 2. Neraca 3. Calk 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas	Ada, sebanyak 3 jenis: 1. Laporan Keuangan LRA 2. Neraca 3. Calk 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas	Ada, sebanyak 3 jenis: 1. Laporan Keuangan LRA 2. Neraca 3. Calk 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas	Ada sebanyak 5 jenis	Ada sebanyak 5 jenis	Ada sebanyak 5 jenis	

[illegible]

**KETERANGAN LUAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

1. Data Tanah Milik Pemda Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, dengan luas : **3.819.785 M²** (jumlah ini termasuk Tanah SLTA)
2. Data Tanah Milik Pemda Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, dengan luas : **3.933.191 M²** (jumlah ini termasuk Tanah SLTA)
3. Luas Tanah Milik Pemda Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dengan luas : **3.656.156 M²** (jumlah ini tidak termasuk Tanah SLTA, karena aset SLTA sudah dimutasikan ke Provinsi - tahun 2018) - (sumber data dari KIB A Tanah/ BMD-BPKD)
4. Luas Tanah Milik Pemda Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah bersertipikat tahun 2018 (termasuk Tanah SLTA se Pesisir Selatan) adalah : **2,193,162 M²**
5. Jumlah Luas Tanah yang dimutasikan ke Provinsi (khusus SLTA) dengan luas : **277.035 M²** atau **(19 Persil)**
6. Jumlah Tanah Milik Pemda yang sudah bersertipikat keadaan 2018 (setelah dikeluarkan SLTA karena sudah dimutasikan ke Provinsi) dengan luas : **1.916.127 M²**
7. Pendaftaran Tanah Milik Pemda yang tertera dalam KIB A Tanah tahun 2019 dengan luas : **99.226 M²**
8. Tanah Milik Pemda yang sudah didaftarkan untuk proses sertipikat tahun 2019 yang tidak tertera dalam KIB A Tanah merupakan tambahan luasannya : **380.090 M²**
9. Total Luas Tanah Milik Pemda yang sudah bersertipikat sampai keadaan 2019 adalah : $1.916.127 + 380.090 = \mathbf{2.296.217 M^2}$
10. Total Luas Tanah Milik Pemda sampai keadaan 2019 adalah : $3.656.156 + 380.090 = \mathbf{4,036,246 M^2}$

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman dan Pertanahan



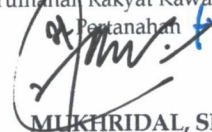
MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

DATA PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	OBJEK TANAH DAN PERUNTUKAN	LOKASI	KECAMATAN	LUAS	NOMOR BERKAS PENDAFTARAN	PENDAFTARAN		KETERANGAN
						PETA BIDANG	SERTIPIKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Pelabuhan Panasahan	Painan Selatan Painan	IV Jurai	18,990	28261/2019	Sudah	Suda ada	Sertifikat Sudah Terbit
2	Tanah EX Nurbaiti	Mandeh	Koto XI Tarusan	30,000		Belum		GU Belum Diserahkan
3	Tanah EX Zainal B	Setara Nanggalo	Koto XI Tarusan	35,000		Belum		GU Belum Diserahkan
4	Tanah Nyiur Melambai	Taluak Batang kapas	Batang Kapas	54,474		Sudah	Sudah Ada	Proses Sertifikat Hilang
5	Tanah Pasar Punggasan	Kenagarian Punggasan	Linggo Sari Baganti	3,627	30508/2019	Belum		Sertifikat Overlap (Dempet)
6	Tanah Balai Ternak Bukik Buai Tapan	Kenagarian Bukit Buai	Basa Ampek Balai Tapan	13,000	14753/2019	Sudah		Proses Pendaftaran Sertifikat
7	Tanah Tanah UPT SDN Ampak Tulak	Kenagarian Ampang Tulak	Basa Ampek Balai Tapan	3,313				Proses Pemisahan Sertifikat a/n. Slamet Hariadi
8	Tanah UPT SDN Alang Rambah Tapan	Alang Ramba	Basa Ampek Balai Tapan	3,895		Belum		Proses Lahan Gambut
9	Tanah Pembangunan Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan/ Agropolitan	Lakitan	Lengayang	90,600	29506/2019	Belum		Proses Lahan Gambut
10	Tanah Mess PU Bayang Sani	Koto Baru	Bayang	2,191	31756/2019	Belum		Proses Peta Bidang
11	Tanah Milik Pemda Tahun 2002 Eks Sunir Malin Kayo	Kenagarian Setara Nanggalo	Koto XI Tarusan	65,000		Belum Ada		Menunggu Pengukuran Pihak BPN
12	Tanah Milik Pemda Tahun 2002 Eks Yulisman	Kenagarian Setara Nanggalo	Koto XI Tarusan	45,000		Belum Ada		Menunggu Pengukuran Pihak BPN
13	Tanah Milik Pemda Tahun 2002 Eks Yulisman	Kenagarian Setara Nanggalo	Koto XI Tarusan	15,000		Belum Ada		Menunggu Pengukuran Pihak BPN
JUMLAH				380,090				

Painan, Januari 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH RUMAH YANG TERFASILITASI PSU
DINAS PERKIMTAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	NAMA PSU	LOKASI	JUMLAH UNIT RUMAH	KET.
1	2	3	4	5
1	PSU Perumahan Bunga Pasang Asri	IV Jurai	50	
2	PSU Rumah Khusus Nelayan Kecamatan Batang Kapas	Batang Kapas	50	
3	PSU Perumahan Puri Indah Lestari Bunga Pasang	IV Jurai	50	
4	PSU RSUD Pratama Tapan	Basa IV Balai Tapan	20	
Jumlah			170	

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

24 Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR TANAH YANG DIMANFAATKAN SESUAI IZIN LOKASI
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	TANAH YANG DIMANFAATKAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA DI ATAS IZIN LOKASI	LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN	KET.
	NIHIL		

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA-SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA-SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA-SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019					
Uraian Pemerintahan : 1.01 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Organisasi : 1.01.04.01 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	-	-	-	-
8.	PENDAPATAN - LO	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
5.	BELANJA	46.176.563.582,00	54.847.809.010,00	8.671.245.428,00	19
9.	BEBAN	46.176.563.582,00	54.847.809.010,00	8.671.245.428,00	19
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.569.778.613,00	2.697.582.225,00	127.803.612,00	5
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.569.778.613,00	2.697.582.225,00	127.803.612,00	5
5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.606.784.969,00	52.150.226.785,00	8.543.441.816,00	20
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.123.050.000,00	1.526.350.000,00	403.300.000,00	36
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.039.494.508,00	28.729.513.540,00	10.690.019.032,00	59
5.2.3.	BELANJA MODAL	24.444.240.461,00	21.894.363.245,00	-2.549.877.216,00	-10
	Jumlah Belanja	46.176.563.582,00	54.847.809.010,00	8.671.245.428,00	19
	Surplus/(Defisit)	(46.176.563.582,00)	-54.847.809.010,00	-8.671.245.428,00	19

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
2.1	Belanja tidak langsung	704.651.150,00	704.651.150,00	704.651.150,00	583.628.775,00	2.697.582.225,00
2.2	Belanja Langsung	23.930.609.347,00	10.923.441.221,00	9.098.622.421,00	8.197.553.796,00	52.150.226.785,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Panan, 07 Oktober 2019

Menyetujui,

Sekretaris Daerah

Ir. ERIZON. M. T

NIP. 196030323 199003 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPPA - SKPD 2.2	
PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019									
Urusan Pemerintahan : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Organisasi : 1.01.04.01. - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
						7	8	9 = 8 - 7	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				874.840.075,00	907.165.075,00	32.325.000,00	3,69
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		79.900.000,00	75.700.000,00	(4.200.000,00)	(5,26)
	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan		291.100.000,00	291.100.000,00		
	08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		62.944.908,00	62.944.908,00		
	09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	kab. Pesisir selatan	12 bulan		5.500.000,00	5.500.000,00		
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		43.751.971,00	43.751.971,00		
	11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		38.079.860,00	27.079.860,00	(11.000.000,00)	(28,89)
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		12.840.970,00	27.840.970,00	15.000.000,00	116,81
	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		13.610.000,00	19.610.000,00	6.000.000,00	44,09
	18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		67.255.000,00	68.077.500,00	822.500,00	1,22
	19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		68.425.000,00	84.327.500,00	15.902.500,00	23,24
	21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Lokasi Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		132.300.000,00	132.300.000,00		
	30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Lokasi kab.Pesisir selatan	12 bulan		59.132.366,00	68.932.366,00	9.800.000,00	16,57
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				445.536.800,00	297.072.300,00	(148.464.500,00)	-33,32

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10

(1.01.04.) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

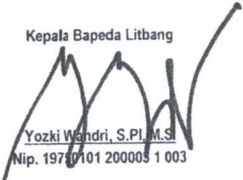
15.		Program Pengembangan Perumahan				11.643.698.716,00	12.831.352.528,00	1.187.653.812,00	10,20
	10.	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		54.904.773,00	79.659.096,00	24.754.323,00	45,09
	11.	Penunjang perumahan pemukiman & BSPS	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		106.058.105,00	106.058.105,00		
	17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni	Lokasi: Kab. Pesisir selatan	412 unit		6.572.000.000,00	7.768.000.000,00	1.196.000.000,00	18,20
	19.	Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	100 %		70.625.375,00	120.693.250,00	50.067.875,00	70,89
	20.	Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	100 %		249.264.942,00	245.014.942,00	(4.250.000,00)	(1,71)
	25.	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	1 pkt		400.000.000,00	366.851.159,00	(33.148.841,00)	(8,29)
	26.	Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	Lokasi: kab. Pesisir Selatan	12 bulan		29.455.056,00	52.580.056,00	23.125.000,00	78,51
	27.	Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	12 bulan		49.390.465,00	4.065.050,00	(45.325.415,00)	(91,77)
	30.	Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	2 pkt		4.112.000.000,00	4.088.430.870,00	(23.569.130,00)	(0,57)
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan				3.963.168.105,00	4.225.597.361,00	262.429.256,00	6,62
	08.	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	500 unit		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
	21.	Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	100 %		263.168.105,00	427.943.105,00	164.775.000,00	62,61
	22.	Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Perumahan	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	4 pkt		1.200.000.000,00	1.297.654.256,00	97.654.256,00	8,14
23.		Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				5.500.221.876,00	4.659.480.070,00	(840.741.806,00)	-15,29
	02.	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	Lokasi: kab. pesisir selatan	12 bulan		49.490.000,00	65.715.000,00	16.225.000,00	32,78
	04.	Penataan Kawasan Kumuh	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	1 pkt		2.681.465.219,00	2.458.791.702,00	(222.673.517,00)	(8,30)
	05.	Penyusunan DED Kawasan Kumuh	Lokasi: kab. Pesisir Selatan	4 pkt		1.472.437.693,00	974.746.693,00	(497.691.000,00)	(33,80)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Lokasi: Kab.Pesisir Selatan	12 bulan		107.072.583,00	84.314.236,00	(22.758.347,00)	(21,26)
	08.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh	Lokasi: Kab.Pesisir Selatan	49 pkt		344.150.761,00	275.740.761,00	(68.410.000,00)	(19,88)
	09.	Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Lokasi: Kab.Pesisir Selatan	12 bulan		65.105.620,00	56.855.620,00	(8.250.000,00)	(12,67)
	10.	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab. Pesisir Selatan	Lokasi: kab.Pesisir Selatan	1 dokumen perencanaan		780.500.000,00	743.316.058,00	(37.183.942,00)	(4,76)
(1.02.04.) - PERTANAHAN									
16.		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				10.892.648.412,00	18.855.252.916,00	7.962.604.504,00	73,10
	04.	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah	Lokasi: kab. Pesisir Selatan	28 sertifikat		253.382.500,00	253.382.500,00		
	05.	Perencanaan Pengadaan Tanah	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	9 Dokumen Perencanaan		115.211.137,00	93.358.176,00	(21.852.961,00)	(18,97)
	06.	Persiapan Pengadaan Tanah	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	9 peta bidang		100.027.628,00	148.754.649,00	48.727.021,00	48,71
	07.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	9 pengadaan Tanah		10.000.000.000,00	17.934.890.444,00	7.934.890.444,00	79,35
	08.	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Lokasi: Kab.Pesisir Selatan	100 %		105.000.000,00	102.840.000,00	(2.160.000,00)	(2,06)
	10.	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Lokasi: kab.Pesisir Selatan	5 Fasilitasi		88.462.500,00	88.462.500,00		
	11.	Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Lokasi: Kab. Pesisir Selatan	100 %		61.169.522,00	61.169.522,00		
	14.	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	Lokasi: kab.pesisir selatan	182 persil		169.395.125,00	172.395.125,00	3.000.000,00	1,77
17.		Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan				94.120.000,00	99.470.000,00	5.350.000,00	5,68
	01.	Fasilitasi Penyelesaian Konflik konflik pertanahan	Lokasi: Pesisir Selatan	11 fasilitasi		94.120.000,00	99.470.000,00	5.350.000,00	5,68
18.		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				220.190.378,00	0,00	(220.190.378,00)	-100,00
	01.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Lokasi: Kab.Pesisir selatan	1 Aplikasi SIMANTAN		220.190.378,00		(220.190.378,00)	(100,00)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
(2.00.02.) - PARIWISATA									
15.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	-100,00
	16.	Pelaksanaan Promosi dan Publikasi	Lokasi: IV jurai	100 %		40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)

Jumlah						43.606.784.969,00	52.150.226.785,00	8.543.441.816,00	20
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	----

Kepala Bapeda Litbang


Yozki Wandri, S.Pi, M.Si
 Nip. 1970101 200003 1 003

Kepala Badan Pendapatan


Dasrianto Putra, S.Sos, M.Si
 Nip. 19731230 199403 1 003

Painan, 07 Oktober 2019

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Suhandri, SE, MM
 Nip. 19700608 200212 1 003

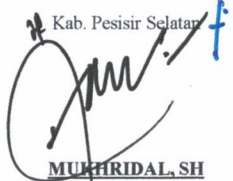
**DAFTAR JUMLAH RUMAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	LOKASI	JUMLAH NAGARI	JUMLAH RTLH 2018	nagari	apbd	apbn	BAZ	PENANGANAN RTLH	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RTLH 2019	JUMLAH RLH	KET.
1	2	3							4			5
1	KOTO XI TARUSAN	23	264	46	60	800	16	922	14,638	0	14,638	
2	BAYANG	17	99	34	20	20	29	103	9,632	0	9,632	
3	BAYANG UTARA	6	103	12	13	40	10	75	1,447	28	1,419	
4	IV JURAI	20	-59	40	104	100	19	263	6,787	0	6,787	
5	BATANG KAPAS	9	129	18	53		16	87	11,692	42	11,650	
6	SUTERA	12	551	24	63	50	18	155	13,351	396	12,955	
7	LENGAYANG	9	255	18	52	65	23	158	16,166	97	16,069	
8	RANAH PESISIR	10	591	20	22		13	55	10,297	536	9,761	
9	LINGGO SARI BAGANTI	16	732	32	6	50	14	102	7,801	630	7,171	
10	AIR PURA	10	304	20	0	138	9	167	3,221	137	3,084	
11	PANCUNG SOAL	10	377	20	9	70	9	108	5,200	269	4,931	
12	BASA IV BALAI TAPAN	10	136	20	18	67	9	114	2,455	22	2,433	
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10	401	20	8	50	13	91	3,147	310	2,837	
14	LUNANG	10	167	20	3	150	10	183	5,038	0	5,038	
15	SILAUT	10	43	20	0	50	13	83	3,366	0	3,366	
	JUMLAH	182	4,093.00	364	431	1650	221	2,666.00	114,238	2,467	111,771	

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kab. Pesisir Selatan

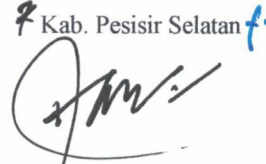


MUKHRIZAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH TANAH UNTUK FASILITAS UMUM
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	KEBUTUHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	KET.
	NIHIL		

Painan, Januari 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

**LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(O P D)
TAHUN ANGGARAN 2019**

PAINAN, 06 JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2019, sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka disusunlah laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Painan , 31 Desember 2019.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196401281993091001**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
NERACA	V
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	VI
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
BAB II EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN/PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
1. Ekonomi Makro.....	8
2. Kebijakan Keuangan.....	8
3. Pencapaian Target Kinerja APBD	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	24
a. Pendapatan.....	24
b. Belanja.....	26
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	28
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	28
2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	29
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	34
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	38
2. Neraca	42
Bab VI PENUTUP	
1. Saran.....	50
2. Kesimpulan.....	50
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	II
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu : Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan

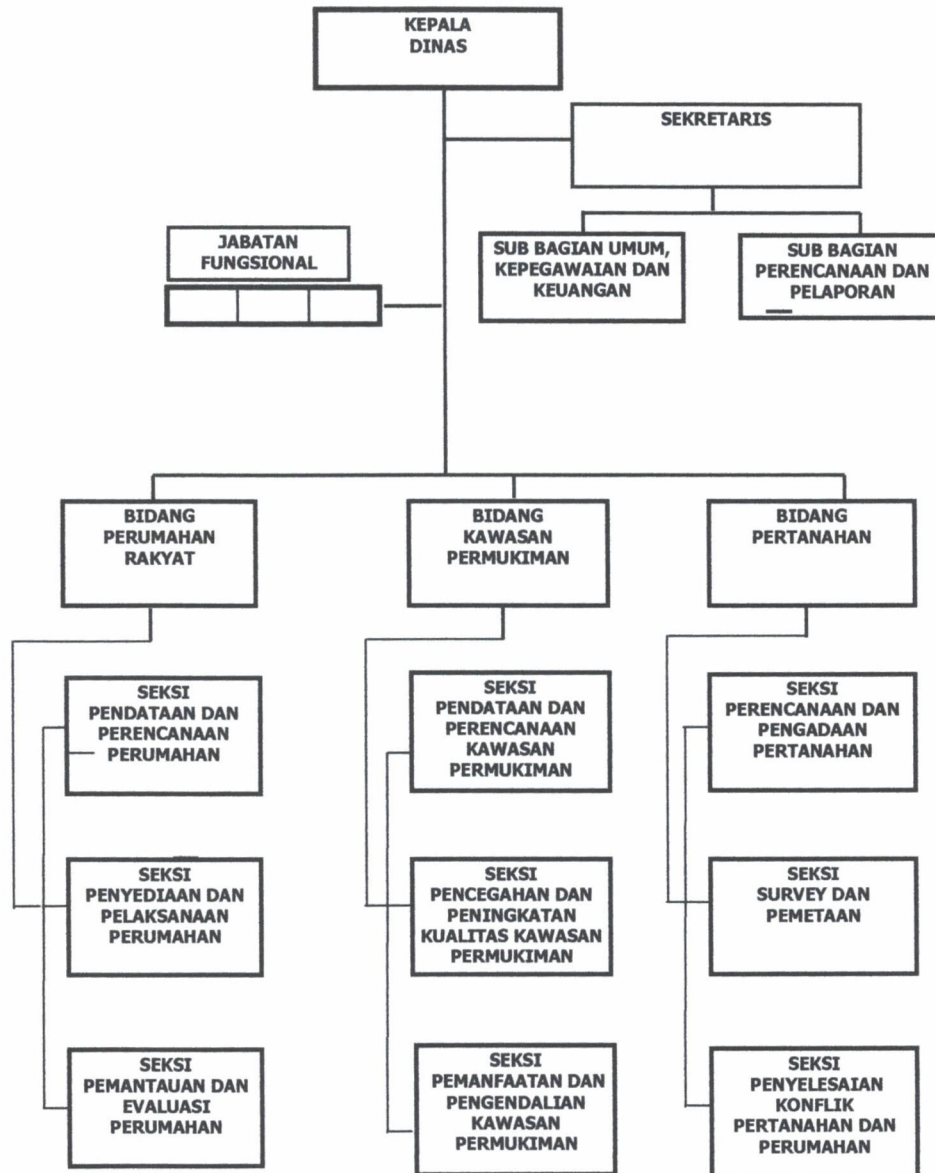
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan , menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah “ **Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan bidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana**”.

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kemasyarakatan dan Infrastruktur
Perumahan Masyarakat dan Kawasan Permukiman.
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.***

Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) BAB dan setiap BAB berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

4.2. Basis Akuntansi

4.3. Basis Pengukuran

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan / pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan.
- Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan
- Meningkatkan mutu Bangunan Gedung, Kawasan permukiman, perumahan dan pertanahan.
- Meningkatkan pelayanan umum bidang Infrastruktur

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu Kebijakan Aspek Belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-OPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Misal :

Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pembangunan Drainase Permukiman.

Contoh :

Input Dana = Rp. 187.000.000,-

Target Kinerja = 1. Dikerjakan oleh Rekanan dan dibantu 1 orang Pengawas Lapangan
2. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dinas Perkimtan.

Keberhasilan = Terciptanya Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pekerjaan, baik administrasi keuangan, Maupun Teknis Di lapangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

3.2. Hambatan & Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah dilaksanakan berkaitan dengan proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, memerlukan pemahaman lebih lanjut dari pihak yang terkait.

Begitu juga dengan sistem pembayaran, pada tahun 2019 sistem pembayaran dengan sistem non tunai sehingga pada awal-awal tahun pembayaran dana kegiatan agak terganggu sedikit, namun dengan berjalannya waktu sistem pembayaran sudah lancar.

Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 baru diterima Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan pada pertengahan Tahun 2019. Hal ini tidak mempengaruhi akan terjadinya pencairan dan pelaksanaan kegiatan bahkan ada kegiatan yang sudah Siap 100 % sebelum Tahun anggaran berakhir.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun Program dan Kegiatan TA. 2019 Pada Dinas Perkimtan :

No	Uraian
a	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (12 Kegiatan)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan alat tulis kantor
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
5	Penyediaan makanan dan minuman
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7	Rapat-rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
B	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (5 Kegiatan)

	1	Pengadaan Meobiler
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
	6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
C		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	1	Monitoring evaluasi dan pelaporan
	2	Sinkronisasi program RPJM cipta karya
D		Program lingkungan sehat perumahan
	1	Pembangunan infrastruktur sanitasi
	2	Penunjang pembangunan infrastruktur sanitasi
	3	Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum)
F		Program pengembangan perumahan
	1	Penunjang perumahan permukiman dan BSPS
	2	Pematangan lahan lokasi rumah tapak
	3	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan
	4	Pendataan dan validasi data rumah tidak layak huni
	5	Rehabilitasi rumah tidak layak huni
	6	Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	7	Penunjang Pembnagunan Rumah Khusus Nelayan
	8	Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni
	9	Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
G		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan
	2	Pembangunan Jalan Minapolitan madeh
H		Program Saluran Drainase/Gorong-gorong
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman
I		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
	1	Pembangunan Gedung kantor
	2	Pembangunan Rumah Dinas
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

J		Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
	1	Perencanaan pengadaan tanah
	2	Persiapan pengadaan tanah
	3	Pelaksanaan pengadaan tanah
	4	Penyerahan hasil pengadaan tanah
	5	Fasilitasi pengadaan tanah
	6	Inventarisasi tanah pemerintah daerah
	7	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah
	8	Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
K		Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman
	2	Penataan Kawasan Kumuh
	3	Penyusunan DED Kawasan Kumuh
	4	Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	5	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh
	6	Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
	7	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab.Pesisir Selatan
L		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
	1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan
M		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
	1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
N		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	1	Pelaksanaan Promosi dan Publikasi

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu : Basis Akrua (Accrual Basis). Pada Cash Accrual Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan. Accrual basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi OPD Accrual basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu Accrual basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapakan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerinah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah belum dilakukan penyusutan
BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH

Bagi OPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegaskan dari Kepala Daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja yang dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2019 yang Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Dianggarkan Sebesar **Rp. 4.223.932.225,-** terealisasi **Rp. 4.055.013.852,-**

Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.849.071.635	1.831.863.552	17.208.083	99.06
Tambahan Penghasilan PNS	848.510.590	835.300.300	13.210.290	98.44
Honorarium PNS dan Non PNS	1.526.350.000	1.387.850.000	138.500.000	90.92
Total	4.223.932.225	4.055.013.852	168.918.373	96.00

Gaji dan tunjangan pegawai mencakup rincian gaji dan tunjangan masing-masing pegawai, di lingkup jajaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019. Pada Tabel 1 terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 17.208.083,-. Kelebihan ini disebabkan perencanaan penganggaran. Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan menganggarkan rapel PNS tahun 2019. Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan Bagi PNS untuk pegawai di lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tabel terlihat terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp 13.210.290,- Hal ini disebabkan tidak adanya kenaikan Gaji dan Tunjangan pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Honorarium PNS dan Non PNS meliputi Honorarium yang menunjang kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada umumnya belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dari Januari s/d 31 Desember 2019 (100 %.) untuk belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan 100,00 % untuk belanja Modal .

2. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk OPD hanya terdiri dari atas :

a. Aset Lancar

ASET LANCAR :	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0
Piutang cadangan persediaan tahun 2019	0
Persediaan	242.721.650
R/K (M) BUD	0
Jumlah Aset Lancar	242.721.650

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, sisa dana yang berada pada pos kas di bendahara pengeluaran Turun dengan signifikan. Kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2018 adalah Rp. 1.642.550,- (Sisa UYHD) dan pada tahun 2019 adalah Rp. 46.685,-. (Sisa UYHD) Hal ini terjadi karena permintaan dana disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kas tidak begitu banyak di kas bendahara pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Seluruh kegiatan sudah berjalan dan pertanggung jawabannya telah dipenuhi.

• Tanah

Saldo akhir tahun 2018 tanah sebesar	Rp. 7.738.073.978,-
Penambahan asset tanah tahun 2019	Rp. 846.081.347,-
Sehingga aset tanah s/d desember 2019 sebesar	Rp.8.584.155.325,-

- **Peralatan dan Mesin**

Saldo akhir tahun 2018 Peralatan Mesin sebesar	Rp. 1.966.549.860,-
Ada penambahan mutasi Tahun 2019 sebesar	Rp. 144.697.800,-
Sehingga Peralatan dan Mesin Tahun 2019	Rp. 2.111.247.660,-

Penambahan akun ini bersumber dari penambahan alat peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat komunikasi, instalasi listrik.

- **Bangunan dan Gedung**

Saldo akhir tahun 2018 gedung dan bangunan sebesar	Rp. 2.114.917.976,-
Penambahan Tahun 2019 sebesar	Rp. 2.712.114.450,-
Sehingga gedung dan bangunan Tahun 2019	Rp. 4.827.032.426,-

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo akhir tahun 2018 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 18.211.913.630,-
Mutasi Tahun 2019 sebesar	Rp. 11.313.743.085,-
Sehingga jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2019 sebesar	Rp 29.525.656.715,-

- **Aset Tetap Lainnya**

Saldo akhir tahun 2018 Aset Tetap Lainnya sebesar	Rp. 0,-
Mutasi Tahun 2019 sebesar	Rp. 0,-
Sehingga aset tetap lainnya Tahun 2019 sebesar	Rp. 0,-

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos. Untuk OPD pos kewajiban-nya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran :

- R/K (K) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 38.055.322.950,-

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tidak ada hambatan /kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran OPD tahun 2019. Hanya ada sedikit keterlambatan proses pencairan dana APBD yang berkaitan dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

6.2. Saran

1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas Pembangunan Gedung, Kawasan Permukiman, Infrastruktur dan penyediaan tanah pembangunan.

Painan, 31 Desember 2019

**KEPALA DINAS PERUMAAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

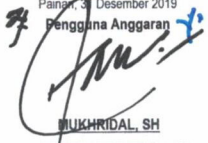
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	54.847.809.010,00	38.053.889.065,00	69,38	-
5.1.	BELANJA OPERASI	32.953.445.765,00	23.037.252.383,00	69,91	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.697.582.225,00	2.667.163.852,00	98,87	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.849.071.635,00	1.831.863.552,00	99,07	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.391.912.623,00	1.381.859.777,00	99,28	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	127.928.407,00	124.995.268,00	97,71	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	171.769.800,00	170.310.000,00	99,15	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	31.994.950,00	31.705.000,00	99,09	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	69.187.171,00	68.219.640,00	98,60	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.791.768,00	4.781.286,00	99,78	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	20.028,00	19.618,00	97,95	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	39.896.642,00	38.760.678,00	97,15	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.892.569,00	2.803.076,00	96,91	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.677.677,00	8.409.209,00	96,91	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	848.510.590,00	835.300.300,00	98,44	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	848.510.590,00	835.300.300,00	98,44	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.255.863.540,00	20.370.088.531,00	67,33	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	406.282.050,00	321.023.097,00	79,01	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	79.996.122,00	77.145.300,00	96,44	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.840.970,00	12.837.000,00	99,97	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	25.170.000,00	21.900.000,00	87,01	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.944.908,00	10.940.050,00	99,96	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	277.330.050,00	198.200.747,00	71,47	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.250.000,00	63.254.000,00	80,84	-
5.1.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	78.250.000,00	63.254.000,00	80,84	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	253.175.000,00	178.596.080,00	70,54	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	7.800.000,00	7.552.000,00	96,82	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	56.400.000,00	52.587.320,00	93,24	-
5.1.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	138.975.000,00	81.095.060,00	58,35	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	13.900.000,00	12.000.000,00	86,33	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	20.800.000,00	10.061.700,00	48,37	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.522.300,00	96.029.799,00	95,53	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	50.800.000,00	50.440.000,00	99,29	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.920.000,00	36.916.799,00	99,99	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.602.300,00	3.300.000,00	49,98	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendraan Bermotor	6.200.000,00	5.373.000,00	86,66	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.597.960,00	71.284.400,00	75,36	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	28.382.960,00	14.823.800,00	52,23	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	66.215.000,00	56.460.600,00	85,27	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	221.700.000,00	196.200.000,00	88,50	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	219.300.000,00	196.200.000,00	89,47	-
5.1.2.08.002.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.400.000,00	-	-	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	178.992.500,00	130.103.500,00	72,69	-
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	80.300.000,00	80.300.000,00	100,00	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	87.260.000,00	40.640.000,00	46,57	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00	2.231.000,00	49,58	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	-
5.1.2.11.008.	Belanja Makan Minum Panitia	2.682.500,00	2.682.500,00	100,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	951.710.000,00	829.264.597,00	87,13	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	605.140.000,00	546.080.000,00	90,24	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	288.800.000,00	234.175.412,00	81,09	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	57.770.000,00	49.009.185,00	84,84	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	32.600.000,00	12.871.080,00	39,48	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	12.871.080,00	85,81	-
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.600.000,00	-	-	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	2.093.978.798,00	2.075.130.000,00	99,10	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.989.288.798,00	1.972.261.000,00	99,14	-
5.1.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	104.690.000,00	102.869.000,00	98,26	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.851.846.957,00	11.258.148.328,00	56,71	-
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.605.000.000,00	9.605.000.000,00	100,00	-
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	10.246.846.957,00	1.653.148.328,00	16,13	-
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	112.750.000,00	103.260.900,00	91,58	-
5.1.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	60.000.000,00	59.680.900,00	99,47	-
5.1.2.23.002.	Belanja sosialisasi	52.750.000,00	43.580.000,00	82,62	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	501.306.375,00	149.307.000,00	29,78	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	471.550.000,00	139.003.000,00	29,48	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	29.756.375,00	10.304.000,00	34,63	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	259.950.000,00	253.550.000,00	97,54	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	234.600.000,00	233.400.000,00	99,49	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.100.000,00	74,00	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	3.250.000,00	2.750.000,00	84,62	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	7.100.000,00	6.300.000,00	88,73	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	1.266.400.000,00	1.134.300.000,00	89,57	-

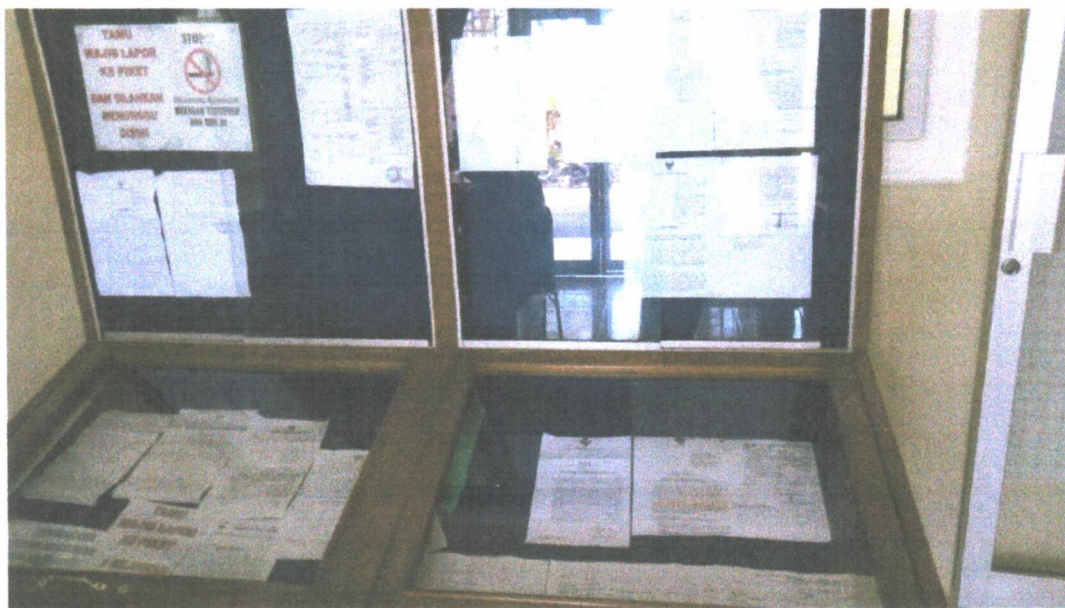
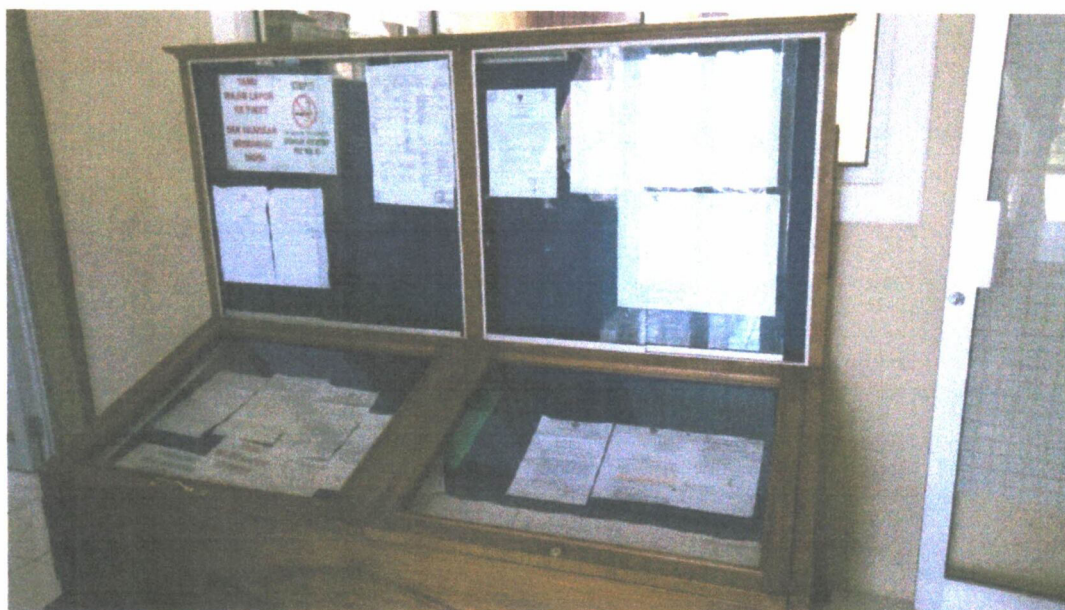
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.26.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	998.500.000,00	872.500.000,00	87,38	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	267.900.000,00	261.800.000,00	97,72	-
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.000.000,00	7.671.200,00	27,40	-
5.1.2.27.001.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	28.000.000,00	7.671.200,00	27,40	-
5.1.2.36.	Belanja Bansos Barang	3.819.801.600,00	3.486.094.550,00	91,26	-
5.1.2.36.001.	Belanja Bansos Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	3.819.801.600,00	3.486.094.550,00	91,26	-
5.2.	BELANJA MODAL	21.894.363.245,00	15.016.636.682,00	68,59	-
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	7.414.993.023,00	846.081.347,00	11,41	-
5.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.371.447.403,00	323.474.367,00	13,64	-
5.2.1.11.001.	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	106.071.024,00	4.985.000,00	4,70	-
5.2.1.11.004.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.251.941.379,00	317.349.367,00	14,09	-
5.2.1.11.008.	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	13.435.000,00	1.140.000,00	8,49	-
5.2.1.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.043.545.620,00	522.606.980,00	10,36	-
5.2.1.13.008.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	3.474.285.159,00	507.038.080,00	14,59	-
5.2.1.13.012.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	1.569.260.461,00	15.568.900,00	0,99	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.550.000,00	144.697.800,00	92,43	-
5.2.2.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.2.2.12.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.600.000,00	5.000.200,00	89,29	-
5.2.2.14.008.	Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas	5.600.000,00	5.000.200,00	89,29	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.750.000,00	56.300.000,00	85,63	-
5.2.2.15.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	65.750.000,00	56.300.000,00	85,63	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	66.400.000,00	64.597.600,00	97,29	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	41.000.000,00	39.380.400,00	96,05	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	25.400.000,00	25.217.200,00	99,28	-
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-
5.2.2.19.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.748.082.672,00	2.712.114.450,00	98,69	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	346.975.219,00	345.148.800,00	99,47	-
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	346.975.219,00	345.148.800,00	99,47	-
5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.401.107.453,00	2.366.965.650,00	98,58	-
5.2.3.02.009.	Belanja modal Pengadaan Bagunan Rumah	2.401.107.453,00	2.366.965.650,00	98,58	-
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.574.737.550,00	11.313.743.085,00	97,75	-
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	4.806.514.660,00	4.631.147.185,00	96,35	-
5.2.4.01.004.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	4.806.514.660,00	4.631.147.185,00	96,35	-
5.2.4.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.753.222.890,00	6.667.595.900,00	98,73	-
5.2.4.09.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	6.753.222.890,00	6.667.595.900,00	98,73	-
5.2.4.21.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.2.4.21.002.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.847.809.010,00)	(38.053.889.065,00)	69,38	-

Painan, 3 Desember 2019
 Pengguna Anggaran

MUKHRIDAL, SH
 NIP. 19640128 199309 1 001

PAPAN PENGUMUMAN



PAPAN PENGUMUMAN





**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

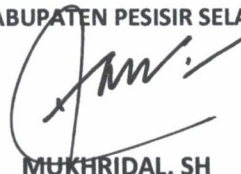
Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah **Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan** per 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dimana Posisi Keuangan Tahun 2019 adalah Sbb :

- Anggaran	Rp. 54.847.809.010,-
- Jumlah SP2D	Rp. 38.055.322.950,-
- Jumlah Realisasi	Rp. 38.053.889.065,-
- Sisa UYHD	Rp. 46.685,-

Painan, 31 Desember 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640128 199309 1 001

1. SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urusan yang dilaksanakan :

1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Jumlah Program sebanyak 6 program dan Kegiatan sebanyak 39 kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Belanja Langsung										Capaian (%)
		Anggaran					Realisasi					
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(4) URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	401,100,000	491,065,075	-	15,000,000	907,165,075	393,800,000	476,997,904	-	15,000,000	885,797,904	97.64
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		75,700,000			75,700,000		70,094,104			70,094,104	92.59
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	291,100,000				291,100,000	283,800,000				283,800,000	97.49
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	52,000,000	10,944,908			62,944,908	52,000,000	10,940,050			62,940,050	99.99
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		5,500,000			5,500,000		5,500,000			5,500,000	100.00
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor		43,751,971			43,751,971		43,733,050			43,733,050	99.96
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		27,079,860			27,079,860		25,523,500			25,523,500	94.25
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12,840,970		15,000,000	27,840,970		12,837,000		15,000,000	27,837,000	99.99
	8 Penyediaan makanan dan minuman		19,610,000			19,610,000		15,826,000			15,826,000	80.70
	9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		68,077,500			68,077,500		67,098,350			67,098,350	98.56
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		84,327,500			84,327,500		83,956,200			83,956,200	99.56
	11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	52,000,000	80,300,000			132,300,000	52,000,000	80,300,000			132,300,000	100.00
	12 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	6,000,000	62,932,366			68,932,366	6,000,000	61,189,650			67,189,650	97.47
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	131,022,300	9,500,000	156,550,000	297,072,300	-	102,733,910	7,371,080	144,697,800	254,802,790	85.77
	13 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional				-	-				-	-	-

No.	Program dan Kegiatan		Belanja Langsung										Capaian (%)
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	pengadaan Peralatan Gedung Kantor				90,800,000	90,800,000				88,397,800	88,397,800	97.35
	15	Pengadaan Meubiler				65,750,000	65,750,000				56,300,000	56,300,000	85.63
	16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas		20,000,000		-	20,000,000	-	2,045,216	-	-	2,045,216	10.23
	17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional		104,420,000		-	104,420,000		97,388,694		-	97,388,694	93.27
	18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor		6,602,300	9,500,000	-	16,102,300		3,300,000	7,371,080	-	10,671,080	66.27
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		-	90,313,430	-	-	90,313,430	-	83,577,600	-	-	83,577,600	92.54
	19	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		62,563,430			62,563,430		57,088,050			57,088,050	91.25
	20	Sinkronisasi Program RPLM Cipta Karya		27,750,000			27,750,000		26,489,550			26,489,550	95.46
4	Program Pengembangan Perumahan		686,550,000	11,777,951,369	-	366,851,159	12,831,352,528	584,450,000	11,349,254,183	-	359,888,650	12,293,592,833	95.81
	21	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	-	79,659,096			79,659,096		71,038,812			71,038,812	89.18
	22	Penunjang Perumahan Permukiman dan BSPS	-	106,058,105			106,058,105		93,111,550			93,111,550	87.79
	23	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	663,000,000	7,105,000,000		-	7,768,000,000	562,500,000	7,105,000,000			7,667,500,000	98.71
	24	Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	8,400,000	112,293,250			120,693,250	8,400,000	101,809,600			110,209,600	91.31
	25	Pendampingan Perbaikan Rumah Tidk Layak Huni		245,014,942			245,014,942	-	221,860,021			221,860,021	90.55
	26	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak				366,851,159	366,851,159				359,888,650	359,888,650	98.10
	27	Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	-	52,580,056			52,580,056	-	36,645,250			36,645,250	69.69
	28	Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni		4,065,050			4,065,050		4,065,050			4,065,050	100.00
	29	Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan rendah	15,150,000	4,073,280,870			4,088,430,870	13,550,000	3,715,723,900			3,729,273,900	91.22

No.	Program dan Kegiatan	Belanja Langsung											Capaian (%)
		Anggaran					Realisasi						
		Belanja Pegawai	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Program Lingkungan sehat Perumahan	314,700,000	2,613,243,105	-	1,297,654,256	4,225,597,361	314,700,000	2,598,107,164	1,152,890,550	4,065,697,714	96.22		
30	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi		2,500,000,000			2,500,000,000		2,500,000,000			100.00		
31	Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi		314,700,000		113,243,105	427,943,105		98,107,164			96.46		
32	Pembangunan PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum) Perumahan	-	-		1,297,654,256		-	-		1,152,890,550	88.84		
6	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	33,000,000	2,167,688,368	-	2,458,791,702	4,659,480,070	33,000,000	2,103,284,752	-	2,448,928,635	4,585,213,387	98.41	
33	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman		65,715,000			65,715,000		59,712,000			90.87		
34	Pentastan Kawasan Kumuh	-	-		2,458,791,702		-	-		2,448,928,635	99.60		
35	Penyusunan DED Kawasan Kumuh	24,600,000	950,146,693			974,746,693	24,600,000	946,846,300			971,446,300	99.66	
36	Pembiayaan Pengembangan dan pengembangan Kawasan Permukiman		84,314,236			84,314,236	-			51,550,664	61.14		
37	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh		275,740,761			275,740,761	-			270,017,200	97.92		
38	Pembiayaan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	6,000,000	50,855,620			56,855,620	6,000,000	45,859,838			51,859,838	91.21	
39	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab. Pesisir Selatan	2,400,000	740,916,058			743,316,058	2,400,000	729,298,750			731,698,750	98.44	
Total		1,435,350,000	17,271,283,647	9,500,000	4,294,847,117	23,010,980,764	1,325,950,000	16,713,955,513	7,371,080	4,121,405,635	22,168,682,228	96.34	

- B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
- D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)
- E. Permasalahan dan Solusi
 - 1. Permasalahan
 - a. Kegiatan Sambungan Listrik Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kec. BAB Tapan - Kec. Silaut tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak cukup yang disebabkan oleh batas waktu pembayaran yang hanya sampai tanggal 14 November 2019 sesuai dengan Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.3/302/BPKD-PS/IX/2019 Tentang langkah - langkah akhir Tahun 2019
 - b. Kegiatan Peningkatan PSU Perumahan Bumi Sago Damai I tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak cukup yang disebabkan oleh batas waktu pembayaran yang hanya sampai tanggal 14 November 2019 sesuai dengan Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.3/302/BPKD-PS/IX/2019 Tentang langkah - langkah akhir Tahun 2019
 - 2. Solusi
- F. Hal-hal yang perlu dilaporkan

1. SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urusan yang dilaksanakan :

1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I. URUSAN PERTANAHAN

A. Jumlah Program sebanyak 2 program dan Kegiatan sebanyak 9 kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan

No	Urusan, Program dan Kegiatan		Belanja Langsung									Tingkat Capaian (%)	
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal		Total
(4) URUSAN PERTANAHAN			45,000,000	11,390,027,727	-	7,519,695,189	18,954,722,916	41,400,000	567,198,510	-	2,560,294,775	3,168,893,285	16.72
10	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah		39,000,000	11,296,557,727	-	7,519,695,189	18,855,252,916	35,400,000	486,444,960	-	2,560,294,775	3,082,139,735	16.35
	1	Perencanaan Pengadaan Tanah				93,358,176	93,358,176				55,413,017	55,413,017	59.36
	2	Persiapan Pengadaan Tanah				148,754,649	148,754,649				48,155,700	48,155,700	32.37
	3	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	31,800,000	10,728,348,080		7,174,742,364	17,934,890,444	28,200,000	114,564,900		2,452,441,428	2,595,206,328	14.47
	4	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah				102,840,000	102,840,000				4,284,630	4,284,630	4.17
	5	Fasilitasi Pengadaan Tanah		88,462,500			88,462,500		58,588,900			58,588,900	66.23
	6	Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		61,169,522			61,169,522		50,771,600			50,771,600	83.00
	7	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	7,200,000.00	165,195,125			172,395,125	7,200,000.00	101,336,350			108,536,350	62.96
	8	Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah		253,382,500			253,382,500		161,183,210			161,183,210	63.61
11	Program Penyelesaian Konflik-Konflik		6,000,000	93,470,000	-	-	99,470,000	6,000,000	80,753,550	-	-	86,753,550	87.22
	9	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	6,000,000.00	93,470,000			99,470,000	6,000,000.00	80,753,550			86,753,550	87.22
J U M L A H			45,000,000	11,390,027,727	-	7,519,695,189	18,954,722,916	41,400,000	567,198,510	-	2,560,294,775	3,168,893,285	16.72

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Pekerjaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan alas hak yang sudah dibagikan ada beberapa pemilik lahan yang belum mengembalikan sehingga proses belum bisa dilanjutkan. Dan ada peta bidang yang belum diterbitkan oleh BPN Kab.Pesisir Selatan

b. Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stadion Mini Kec. Lengayang, masih dalam proses peta bidang di BPN Kab. Pesisir Selatan

c. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung Kec. Bayang, masih dalam proses peta bidang di BPN Kab. Pesisir Selatan

d. Pekerjaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Penasahan tidak jadi dilaksanakan karena ada 5 pemilik lahan belum mengembalikan bahan alas Hak nya.

e. Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Intake, IPA dan Reservoir koto pulai nagari kambang timur kec. Lengayang masih dalam tahapan persiapan

f. Pengadaan Tanah Untuk PembangunanLaboratorium dan Rumah Dinas PDAM Kec. IV jurai masih dalam tahapan persiapan

2. Solusi

a. Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2020

F. Hal-hal yang perlu dilaporkan

1. SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urusan yang dilaksanakan :

1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Pertanahan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Jumlah Program sebanyak 3 program dan Kegiatan sebanyak 7 kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan

No	Urusan, Program dan Kegiatan		Belanja Langsung									Tingkat Capaian (%)	
			Anggaran					Realisasi					
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal	Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal		Total
(3)	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		-	-	-	10,184,523,105	10,184,523,105	-	-	-	10,049,149,700	10,049,149,700	98.67
12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		-	-	-	2,381,231,513	2,381,231,513	-	-	-	2,352,225,800	2,352,225,800	98.78
	1	Pembangunan Gedung Kantor	-	-		97,075,219	97,075,219		-		97,075,000	97,075,000	100.00
	2	Pembangunan Rumah Dinas	-	-		1,747,991,601	1,747,991,601		-		1,731,565,000	1,731,565,000	99.06
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	-	-		286,264,693	286,264,693	-	-		275,512,000	275,512,000	96.24
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-		249,900,000	249,900,000	-	-		248,073,800	248,073,800	99.27
9	Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong		-	-	-	6,753,222,890	6,753,222,890	-	-	-	6,667,595,900	6,667,595,900	98.73
	5	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman				6,753,222,890	6,753,222,890		-		6,667,595,900	6,667,595,900	98.73
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh		-	-	-	1,050,068,702	1,050,068,702	-	-	-	1,029,328,000	1,029,328,000	98.02
	6	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan				851,394,702	851,394,702		-		834,811,350	834,811,350	98.05
	7	Pembangunan Jalan Minapolitan				198,674,000	198,674,000		-		194,516,650	194,516,650	97.91
J U M L A H			-	-	-	10,184,523,105	10,184,523,105	-	-	-	10,049,149,700	10,049,149,700	98.67

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

D. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
2. Solusi

F. Hal-hal yang perlu dilaporkan

Lampiran III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

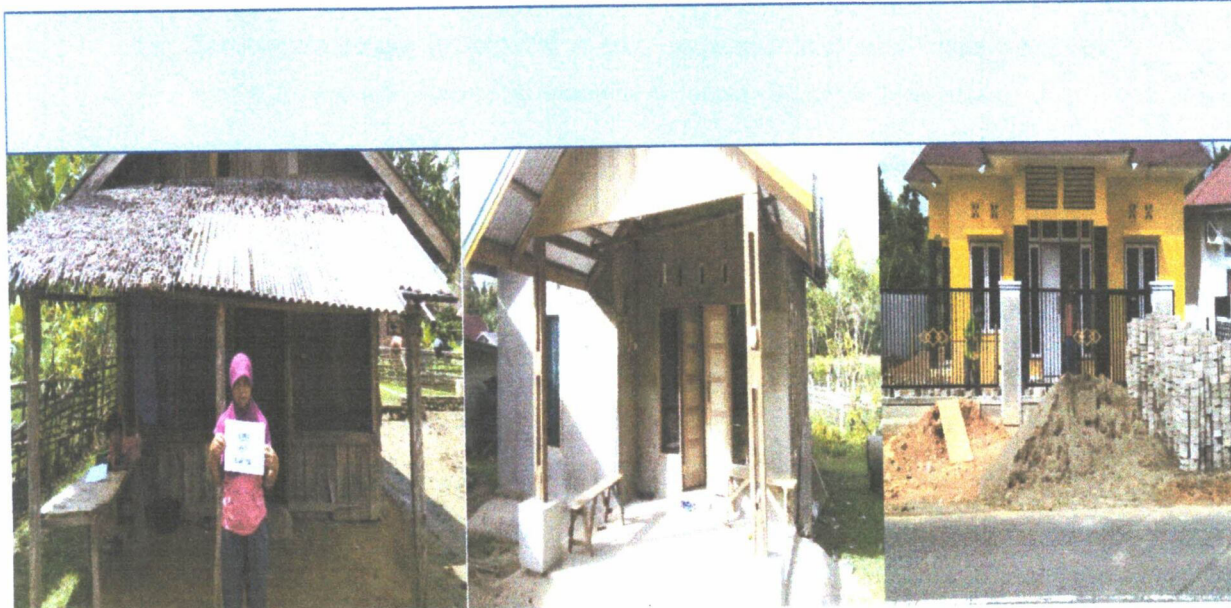
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (tahun 2017)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar daerah		Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak 1 MOU	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 1 MOU MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Dirjen PU Cipta Karya, Dinas PU Tarkim Propinsi Sumatera Barat Ttg kerjasama Pembangunan Daerah Bidang Cipta Karya	1 MOU	
	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan		Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2019	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak Yang terdiri dari :	 penghargaan	



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) 2017-2021



BAB VIII

PENUTUP

Demikian rancangan rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun sebagai arahan pelayanan dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk dijadikan pedoman bagi tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, anggaran dinas, rencana program, dan rencana prioritas kegiatan.

Peran serta dari semua pihak penyelenggara pembangunan akan turut menentukan pencapaian target kinerja dalam mendukung Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2017-2021. Dalam hal ini renstra dapat digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

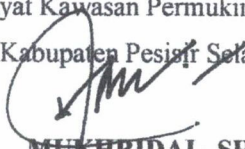
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya maksimal serta kesungguhan dari semua pihak sangat diperlukan agar seluruh rencana ini dapat diwujudkan.

Painan, Juni 2018

KEPALA DINAS

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Pesisir Selatan


MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Standar operasional prosedur
(sop)**

TAHUN ANGGARAN 2019

REKAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

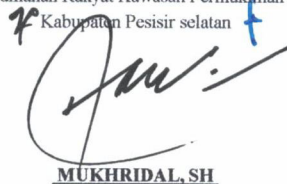
SOP

TAHUN 2019

No	NAMA SOP	Ket
1	2	3
1	Prosedur Usulan Penghapusan Barang Inventaris	
2	Pencatatan dan Penyaluran Barang Belanja Modal (Inventaris)	
3	Pengelolaan Naskah Dinas Masuk	
4	Pengajuan SPJ	
5	Pengajuan SPP LS	
6	Pengajuan SPP GU	
7	Pengajuan SPP UP	
8	Pengenterian Data Keuangan pada SIPKD	
10	Penyusunan Renja dan Renstra	
11	Penyusunan RKA	
12	Penyusunan LKJIP, LKPJ dan LPPD	
13	Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas	
14	Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
15	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Unit Kerja Terkait	
16	Pelaksanaan Tugas Lain Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
17	Pengajuan Pembangunan Rumah Dinas	
18	Bantuan Rehab Rumah Tidal Layak huni	
19	Pencairan Bantuan Rehab rumah Tidak Layak Huni	

No	NAMA SOP	Ket
1	2	3
20	Pengajuan Bantuan Pembangunan Air Limbah Setempat	
21	Pencairan Bantuan Rehab rumah Tidak Layak Huni Dana DAK Perumahan	
22	Pembuatan Perencanaan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU) Perumahan	
23	Pengajuan Bantuan Air Limbah Setempat (ALS)	
24	Pencairan Bantuan Fasilitas Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
25	Pengajuan Bantuan Fasilitas Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
26	Pengajuan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak huni	
27	Pengusulan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan	
28	Pengusulan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Lingkungan dan Jalan Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan	
29	Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan Tanah Untuk Pembangunan	
30	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Atas Tanah hibah	
31	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	
32	Inventarisasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah	
33	Pengusulan Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	

Painan, Januari 2020
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir selatan



MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENCANA KERJA ANGGARAN
(RKA)**

TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD 2.2				
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN									
TAHUN ANGGARAN 2019									
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
ORGANISASI : 1.01.04.01. - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(1.01.) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			401.100.000,00	473.740.075,00		874.840.075,00	
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	79.900.000,00	-	79.900.000,00	
	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	291.100.000,00	-	-	291.100.000,00	
	08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	52.000.000,00	10.944.908,00	-	62.944.908,00	
	09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	kab. Pesisir selatan	12 bulan	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	43.751.971,00	-	43.751.971,00	
	11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	38.079.860,00	-	38.079.860,00	
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	12.840.970,00	-	12.840.970,00	
	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	13.610.000,00	-	13.610.000,00	
	18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	67.255.000,00	-	67.255.000,00	
	19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	68.425.000,00	-	68.425.000,00	
	21.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	52.000.000,00	80.300.000,00	-	132.300.000,00	
	30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	kab.Pesisir selatan	12 bulan	6.000.000,00	53.132.366,00	-	59.132.366,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				91.295.000,00	354.241.800,00	445.536.800,00	
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.pesisir selatan	3 unit	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
	09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pesisir selatan	9 unit	-	-	57.800.000,00	57.800.000,00	
	10.	Pengadaan Meubiler	Kab. Pesisir Selatan	26 unit	-	-	66.441.800,00	66.441.800,00	
	21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-	12 bulan	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Pesisir Selatan	12 bulan	-	68.920.000,00	-	68.920.000,00	

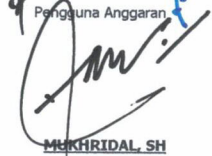
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	22.375.000,00	-	22.375.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				92.265.930,00		92.265.930,00	
	06.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	62.928.430,00	-	62.928.430,00	
	09.	Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya	Kab.Pesisir Selatan	100 %	-	29.337.500,00	-	29.337.500,00	
(1.01.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
15.		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	
	31.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Kab.Pesisir Selatan	6 pkt	-	-	950.000.000,00	950.000.000,00	
	32.	Pembangunan Jalan Minapolitan	Kab. Pesisir Selatan	1 pkt	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
16.		Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong					5.940.094.677,00	5.940.094.677,00	
	13.	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	Kab. Pesisir Selatan	41 pkt	-	-	5.940.094.677,00	5.940.094.677,00	
36.		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan					2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	
	03.	Pembangunan Gedung Kantor	Kab.Pesisir Selatan	2 pkt	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
	04.	Pembangunan Rumah Dinas	Kab.Pesisir Selatan	3 pkt	-	-	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	
	05.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Kab.Pesisir Selatan	2 pkt	-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	
	08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kab.Pesisir Selatan	2 pkt	-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	
(1.01.04.) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
15.		Program Pengembangan Perumahan			418.950.000,00	10.824.748.716,00	400.000.000,00	11.643.698.716,00	
	10.	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	54.904.773,00	-	54.904.773,00	
	11.	Penunjang perumahan permukiman & BSPS	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	106.058.105,00	-	106.058.105,00	
	17.	Rehap Rumah Tidak Layak Huni	Kab.Pesisir selatan	412 unit	402.000.000,00	6.170.000.000,00	-	6.572.000.000,00	
	19.	Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pesisir Selatan	100 %	7.200.000,00	63.425.375,00	-	70.625.375,00	
	20.	Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pesisir Selatan	100 %	-	249.264.942,00	-	249.264.942,00	
	25.	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	Kab. Pesisir Selatan	1 pkt	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	
	26.	Penunjang Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	ka. Pesisir Selatan	12 bulan	-	29.455.056,00	-	29.455.056,00	
	27.	Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pesisir Selatan	12 bulan	-	49.390.465,00	-	49.390.465,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	30.	Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kab. Pesisir Selatan	2 pkt	9.750.000,00	4.102.250.000,00	-	4.112.000.000,00	
16.		Program Lingkungan Sehat Perumahan			211.800.000,00	2.551.368.105,00	1.200.000.000,00	3.963.168.105,00	
	08.	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Kab. Pesisir Selatan	500 unit	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	
	21.	Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Kab.Pesisir Selatan	100 %	211.800.000,00	51.368.105,00	-	263.168.105,00	
	22.	Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Perumahan	Kab. Pesisir Selatan	4 pkt	-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
23.		Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			37.200.000,00	2.781.556.657,00	2.681.465.219,00	5.500.221.876,00	
	02.	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	kab. pesisir selatan	12 bulan	-	49.490.000,00	-	49.490.000,00	
	04.	Penataan Kawasan Kumuh	Kab. Pesisir Selatan	1 pkt	-	-	2.681.465.219,00	2.681.465.219,00	
	05.	Penyusunan DED Kawasan Kumuh	kab. Pesisir Selatan	4 pkt	27.750.000,00	1.444.687.693,00	-	1.472.437.693,00	
	06.	Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab.Pesisir Selatan	12 bulan	-	107.072.583,00	-	107.072.583,00	
	08.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh	Kab.Pesisir Selatan	49 pkt	600.000,00	343.550.761,00	-	344.150.761,00	
	09.	Penunjang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	Kab.Pesisir Selatan	12 bulan	6.000.000,00	59.105.620,00	-	65.105.620,00	
	10.	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kab. Pesisir Selatan	kab.Pesisir Selatan	1 dokumen perencanaan	2.850.000,00	777.650.000,00	-	780.500.000,00	
(1.02.04.) - PERTANAHAN									
16.		Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			39.000.000,00	885.209.647,00	9.968.438.765,00	10.892.648.412,00	
	04.	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah	-	28 sertifikat	-	253.382.500,00	-	253.382.500,00	
	05.	Perencanaan Pengadaan Tanah	Kab. Pesisir Selatan	9 Dokumen Perencanaan	-	-	115.211.137,00	115.211.137,00	
	06.	Persiapan Pengadaan Tanah	Kab. Pesisir Selatan	9 peta bidang	-	-	100.027.628,00	100.027.628,00	
	07.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Kab. Pesisir Selatan	9 pengadaan Tanah	31.800.000,00	320.000.000,00	9.648.200.000,00	10.000.000.000,00	
	08.	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Kab.Pesisir Selatan	100 %	-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	
	10.	Fasilitasi Pengadaan Tanah	kab.Pesisir Selatan	5 Fasilitasi	-	88.462.500,00	-	88.462.500,00	
	11.	Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Kab. Pesisir Selatan	100 %	-	61.169.522,00	-	61.169.522,00	
	14.	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	kab.pesisir selatan	182 persil	7.200.000,00	162.195.125,00	-	169.395.125,00	
17.		Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan			6.000.000,00	88.120.000,00		94.120.000,00	
	01.	Fasilitasi Penyelesaian Konflik konflik pertanahan	Pesisir Selatan	11 fasilitasi	6.000.000,00	88.120.000,00	-	94.120.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
18.		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			6.000.000,00	214.190.378,00		220.190.378,00	
	01.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Kab.Pesisir selatan	1 Aplikasi SIMANTAN	6.000.000,00	214.190.378,00	-	220.190.378,00	
(2.00.02.) - PARIWISATA									
15.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			3.000.000,00	37.000.000,00		40.000.000,00	
	16.	Pelaksanaan Promosi dan Publikasi	IV jurai	100 %	3.000.000,00	37.000.000,00	-	40.000.000,00	
Jumlah					1.123.050.000,00	18.039.494.508,00	24.444.240.461,00	43.606.784.969,00	0,00

Painan, 12 Februari 2019

Pengguna Anggaran


MUKHRIZAL SH

NIP. 19640128 199309 1 001